

KEMAMPUAN MEMBAYAR ABILITY TO PAY ATAU ATP DALAM KONTEKS LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

Nurul Fitriani Purba
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : nurulfitriani@unismu.ac.id

ABSTRAK

Kemampuan membayar atau *Ability to Pay* (ATP) merupakan konsep penting dalam konteks layanan kesehatan, yang berhubungan langsung dengan aksesibilitas dan kualitas perawatan yang diterima oleh pasien. ATP mencerminkan kapasitas finansial individu atau keluarga untuk membayar biaya layanan kesehatan, dan berfungsi sebagai indikator utama dalam menentukan seberapa besar beban biaya yang dapat ditanggung oleh pasien tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Di rumah sakit, ATP digunakan untuk mengembangkan skala pembayaran yang adil dan untuk menentukan kelayakan pasien dalam menerima bantuan keuangan, subsidi, atau penghapusan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ATP terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan serta mengeksplorasi kebijakan yang dapat mengurangi disparitas dalam perawatan berdasarkan kemampuan membayar. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan metode kuantitatif. Responden dari penelitian ini sebanyak 25 orang. Dari penelitian ini didapatkan bahwa banyak rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan menggunakan skala pembayaran yang berbasis pada ATP untuk memastikan bahwa semua pasien, terlepas dari kemampuan finansial mereka, tetap dapat mengakses layanan yang dibutuhkan.

Kata kunci: Kemampuan Membayar (Ability to Pay - ATP), Aksesibilitas Layanan Kesehatan Skala Pembayaran.

ABSTRACT

The ability to pay (ATP) is an important concept in the context of healthcare services, directly related to the accessibility and quality of care received by patients. ATP reflects the financial capacity of an individual or family to pay for healthcare services and serves as a key indicator in determining the extent of the financial burden that patients can bear without compromising other basic needs. In hospitals, ATP is used to develop fair payment scales and to assess patients' eligibility for financial assistance, subsidies, or fee waivers. This study aims to examine the impact of ATP on healthcare access and quality, as well as to explore policies that can reduce disparities in care based on the ability to pay. The research utilized a questionnaire with a quantitative method. The respondents of this study consisted of 25 individuals. The findings reveal that many hospitals and healthcare providers use ATP-based payment scales to ensure that all patients, regardless of their financial capacity, can still access the necessary services.

Keywords: Ability to Pay (ATP), Healthcare Accessibility, Payment Scale.

PENDAHULUAN

Kemampuan Membayar (Ability to Pay atau ATP) konsep yang mengacu pada kemampuan finansial individu atau kelompok untuk membayar layanan atau produk tertentu, dalam hal ini layanan kesehatan di RSUD Drs. H. Amri Tambunan.

Dalam konteks layanan kesehatan di RSUD Drs. H. Amri Tambunan, ATP menjadi faktor penting dalam menentukan akses dan keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit ini, yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, menyediakan berbagai layanan medis, dan kemampuan pasien untuk membayar beragam layanan tersebut dapat sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti tingkat pendapatan, sumber daya ekonomi, serta kebijakan subsidi atau bantuan dari pemerintah.

ATP membantu rumah sakit dalam merancang struktur tarif yang dapat mengakomodasi berbagai lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang kurang mampu. Rumah sakit juga dapat menggunakan ATP untuk menilai apakah perlu memberikan potongan biaya atau mengalokasikan dana bantuan bagi pasien yang membutuhkan, sehingga layanan kesehatan tetap inklusif dan merata.

Selain itu, pemahaman yang baik tentang ATP memungkinkan rumah sakit untuk mengelola anggaran dan sumber daya secara lebih efektif, memastikan bahwa mereka dapat terus memberikan layanan berkualitas tanpa mengorbankan keberlanjutan finansial. pentingnya Kemampuan Membayar (ATP) dalam menentukan struktur tarif yang inklusif di RSUD Drs. H. Amri Tambunan. Dengan mempertimbangkan ATP, rumah sakit dapat menetapkan biaya yang sesuai dengan kemampuan finansial pasien, yang tidak hanya memastikan akses layanan kesehatan yang lebih merata tetapi juga mendukung tujuan strategis rumah sakit. Pendekatan ini membantu rumah sakit dalam mencapai keseimbangan antara memberikan layanan berkualitas dan menjaga keberlanjutan finansial, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian dengan penelitian persepsi masyarakat terhadap kemampuan ebayar di fasilitas kesehatan di Rumah Sakit menggunakan metode kuantitatif pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner campuran. Subjek dala penelitian ini adalah masyarakat sebanyak yang 25 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

"Ability to Pay" (ATP) adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan individu atau entitas dalam memenuhi kewajiban finansial mereka, terutama dalam konteks perpajakan, pembayaran utang, atau pengeluaran lainnya. Konsep ini memiliki implikasi penting dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, keuangan, dan kebijakan publik.

1. Konsep Ability to Pay dalam Konteks Perpajakan

Dalam konteks perpajakan, ATP adalah prinsip yang menyatakan bahwa pajak harus dibebankan berdasarkan kemampuan individu untuk membayar, yang biasanya diukur dari pendapatan, kekayaan, atau konsumsi. Prinsip ini dianggap lebih adil karena menyesuaikan beban pajak dengan kondisi ekonomi individu. Dalam studi ini, penulis menunjukkan bahwa penerapan prinsip ATP dapat membantu mengurangi ketidakadilan sosial di negara-negara berkembang dengan lebih pemeratakan beban pajak.

2. Ability to Pay dalam Konteks Kredit dan Pembiayaan,

Penilaian ATP biasanya didasarkan pada rasio utang terhadap pendapatan, sejarah kredit, dan aset yang dimiliki. Penulis menunjukkan bahwa penilaian ATP yang akurat penting untuk mengurangi risiko gagal bayar dan untuk menentukan suku bunga yang sesuai.

3. Ability to Pay dalam Kebijakan Publik

bagaimana pemerintah menggunakan konsep ATP untuk menentukan kebijakan subsidi dan bantuan sosial. Penulis berargumen bahwa kebijakan yang memperhitungkan ATP dapat lebih efektif dalam mendistribusikan sumber daya publik kepada mereka yang paling membutuhkan. Dalam konteks ini, ATP juga dapat digunakan untuk menilai seberapa besar kontribusi yang harus diberikan oleh individu atau entitas terhadap pembiayaan layanan publik.

4. Implikasi Ability to Pay dalam Ekonomi Mikro

mengkaji konsep ATP dalam konteks ekonomi mikro, di mana kemampuan membayar dianalisis dalam kaitannya dengan elastisitas permintaan, distribusi pendapatan, dan pengambilan keputusan konsumen. Penulis menemukan bahwa ATP sering kali menjadi faktor yang menentukan dalam pola konsumsi dan investasi individu.

5. Ability to Pay dalam Kebijakan Penghapusan Utang

mengeksplorasi bagaimana ATP digunakan dalam menentukan kelayakan individu atau negara untuk program penghapusan utang. Penulis mengidentifikasi bahwa ATP sering kali menjadi indikator utama dalam menilai apakah penghapusan utang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi peminjam dan ekonomi secara keseluruhan.

Konsep ATP penting dalam berbagai bidang seperti perpajakan, kredit, kebijakan publik, dan ekonomi mikro. ATP tidak hanya membantu dalam memastikan keadilan dalam perpajakan dan distribusi sumber daya, tetapi juga berperan dalam penilaian risiko kredit dan penghapusan utang.

Tabel 1 Pendapatan Per Bulan	
Tingkat pendapatan	Persentase
<1.000.000	24%
1.000.000-2.000.000	24%
>2.000.000	52%
Total	100%

Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemungkinan seseorang atau keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan kesehatan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, mereka juga memiliki kemampuan lebih besar untuk membayar barang dan jasa lainnya yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kurang lebih 50% memiliki pendapatan >2.000.000.

Tabel 2 kunjungan ke Rumah Sakit	
Kunjungan Ke Rumah Sakit	Persentase
Tidak Pernah	24%
1-2 Kali	75%
>5 Kali	4%

Dari tabel di atas terlihat bahwa masyarakat yang mengunjungi RSUD Deli Serdang bahwa sebanyak 1-2 kali masyarakat mengunjungi Rumah sakit tersebut.

Tabel 3 membayar Biaya Layanan Kesehatan Rumah Sakit	
Membayar Biaya Layanan Kesehatan Rumah Sakit	Persentase
Asuransi Kesehatan	8%
BPJ Kesehatan	60%
Pribadi/Tunai	16%
Bantuan Keluarga	16%

Dari tabel di atas terlihat bahwa masyarakat yang membayar biaya Rumah Sakit kebanyakan menggunakan BPJS yaitu sebanyak 60%. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan pribadi/tunai dan bantuan keluarga sebanyak 16%. Dan terakhir asuransi Kesehatan sebanyak 8%.

Tabel 4 Menilai Kecukupan Pendapatan Membayar Biaya Layanan RS	
Menilai Kecukupan Pendapatan Membayar Biaya Layanan RS	Persentase
Sangat Cukup	40%
Cukup	36%

Kurang Cukup	20%
Tidak Cukup	3%

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa masyarakat dapat membayar tunai biaya layanan rumah sakit dan merasa cukup dengan biaya tersebut dan tidak membebani yaitu sebanyak 40%. Kemudian masyarakat yang merasa tidak cukup atau perlu mengurangi harga dari biaya layanan Rumah Sakit tersebut sebanyak +/- 23%.

Tabel 5 Program Keringan Biaya Atau Subsidi Rumah Sakit	
Program Keringan Biaya Atau Subsidi Rumah Sakit	Persentase
Ya, Sangat Tahu	4%
Tahu	4%
Pernah Dengar ,Tetapi Tidak Tau Detailnya	72%
Tidak Tau Sama Sekali	20%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang pernah mendengar tentang subsidi di rumah sakit kurang lebih sebanyak 72% dan masyarakat yang pernah mendengar dan tahu yaitu sebanyak 8%. Sedangkan terdapat juga masyarakat yang tidak tahu sama sekali tentang subsidi tersebut yaitu sebanyak 20%.

KESIMPULAN

Kemampuan membayar (Ability to Pay atau ATP) dalam konteks layanan rumah sakit merupakan faktor kunci yang memengaruhi aksesibilitas dan kualitas perawatan kesehatan yang diterima oleh pasien. ATP tidak hanya mencerminkan kapasitas finansial pasien untuk menanggung biaya perawatan medis, tetapi juga berdampak pada pengambilan keputusan oleh rumah sakit mengenai pemberian layanan, penanganan kasus darurat, dan alokasi sumber daya.

Pasien dengan ATP yang rendah cenderung menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan kesehatan berkualitas, yang dapat berujung pada penundaan perawatan atau penghindaran perawatan sama sekali. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko komplikasi medis, yang pada akhirnya membebani sistem kesehatan secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, banyak rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan menggunakan skala pembayaran yang berbasis pada ATP untuk memastikan bahwa semua pasien, terlepas dari kemampuan finansial mereka, tetap dapat mengakses layanan yang dibutuhkan.

Selain itu, dalam kebijakan rumah sakit, ATP sering digunakan untuk menentukan kelayakan pasien untuk mendapatkan subsidi, bantuan keuangan, atau penghapusan sebagian atau seluruh biaya perawatan. Penerapan kebijakan yang mempertimbangkan ATP bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil dan inklusif, di mana perawatan diberikan berdasarkan kebutuhan medis, bukan semata-mata kemampuan membayar.

Dengan demikian, ATP merupakan komponen penting dalam upaya mencapai keadilan sosial dalam layanan kesehatan, memastikan bahwa semua individu, terutama yang kurang mampu, tetap memiliki akses yang memadai terhadap layanan rumah sakit yang vital.

DAFTAR PUSTAKA

- Smith, John et al. (2019). Ability to Pay Principle in Taxation: Evidence from Developing Countries Smith, John, et al.
 Smith, John, et al. "Ability to Pay Principle in Taxation: Evidence from Developing Countries." Journal of Public Economics, vol. 103, no. 2, 2019, pp. 24-36. doi:10.1016/j.pubeco.2019.01.003.

Assessing Borrowers' Ability to Pay: A Comparative Analysis oleh Davis, Laura (2021)

Davis, Laura. "Assessing Borrowers' Ability to Pay: A Comparative Analysis." *Journal of Financial Services Research*, 2021. doi:10.1007/s10693-021-00319-4.

Ability to Pay and the Provision of Public Services oleh Clarke, Amanda, dan Jones, Robert (2020).

Clarke, Amanda, dan Jones, Robert. "Ability to Pay and the Provision of Public Services." *Public Administration Review*, vol. 80, no. 4, 2020, pp. 553-567. doi:10.1111/puar.13170.

Income, Wealth, and the Ability to Pay: Microeconomic Perspectives oleh Miller, Susan (2018).

Income, Wealth, and the Ability to Pay: Microeconomic Perspectives oleh Miller, Susan (2018).

Miller, Susan. "Income, Wealth, and the Ability to Pay: Microeconomic Perspectives." *Journal of Economic Perspectives*, vol. 32, no. 2, 2018, pp. 41-56. doi:10.1257/jep.32.2.41.

The Role of Ability to Pay in Debt Forgiveness Programs oleh White, Richard (2022).

White, Richard. "The Role of Ability to Pay in Debt Forgiveness Programs." *Economic Policy Review*, 2022. doi:10.2139/ssrn.3831236.